



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERMA YUNI MASTUTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PIUTANG NEGARA
3. NHK : 815358

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.075.540.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 3.777 m2 di KAB / KOTA CILACAP, Rp. 75.540.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.603.143

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.188.143.143

III. HUTANG Rp. 283.220.685

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.904.922.458

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.